Analisis Penerapan PSAK 109 (Revisi 2021) terhadap Penyajian Laporan Keuangan Lembaga Zakat di Baitulmaal Muamalat dan Implikasi Hukumnya

Intan Nur Apriliani*, Panji Adam Agus Putra, Intan Manggala

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*intanurapriliani@gmail.com, panjiadam@unisba.ac.id, intanmanggala267@gmail.com

Abstract. Amil zakat institutions must manage ZIS transparently and accountably according to sharia principles, as regulated in PSAK 109 (Revised 2021) concerning ZIS accounting. This PSAK functions as a guideline for recording financial report accounting, especially for zakat management organizations (OPZ). The purpose of this study was to determine the application of PSAK 109 (Revised 2021) in recording and reporting ZIS finances at the Baitulmaal Muamalat zakat institution and to determine law enforcement for zakat institutions that do not record ZIS fund management. This study uses a qualitative method with a sociological approach. Data were collected through observation, questionnaires, and documentation. The types of data used are primary data and secondary data. The data analysis technique was carried out descriptively through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show 1) Baitulmaal Muamalat in preparing financial reports of zakat, infaq, and alms funds is not fully in accordance with PSAK 109 (Revised 2021). In terms of distributing zakat, infaq, and alms carried out through other entities, the implementation of Baitulmaal Muamalat in its accounting records must still comply with the provisions of PSAK 109 (Revised 2021). 2) Zakat institutions that do not record the management of ZIS funds in accordance with regulations may be subject to administrative sanctions such as written warnings, temporary suspension, and revocation of operational permits. These sanctions include *ta'zir al-khashshah* (sanctions of reduction of rights) given by BAZNAS or the Minister of Religion as the authorized authority.

Keywords: *ZIS Accounting, Baitulmaal Muamalat, PSAK 109 Revised 2021.*

Abstrak. Lembaga amil zakat harus mengelola ZIS dengan transparan dan akuntabel sesuai prinsip syariah, seperti yang diatur dalam PSAK 109 (Revisi 2021) tentang akuntansi ZIS. PSAK tersebut berfungsi sebagai pedoman pencatatan akuntansi laporan keuangan terutama bagi organisasi pengelola zakat (OPZ). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan PSAK 109 (Revisi 2021) pada pencatatan dan pelaporan keuangan ZIS di lembaga zakat Baitulmaal Muamalat dan mengetahui implikasi hukum bagi lembaga amil zakat yang tidak melakukan pencatatan pengelolaan dana ZIS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi. Data dikumpulkan melalui observasi, angket, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 1) Baitulmaal Muamalat dalam menyusun laporan keuangan dana zakat, infak, dan sedekah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 (Revisi 2021). Dalam aspek penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan melalui entitas lain, implementasi Baitulmaal Muamalat dalam pencatatan akuntansinya masih harus menyesuaikan dengan ketentuan PSAK 109 (Revisi 2021). 2) Lembaga zakat yang tidak mencatat pengelolaan dana ZIS sesuai regulasi dapat dikenai sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara, dan pencabutan izin operasional. Sanksi ini termasuk *ta'zir al-khashshah* (sanksi pengurangan hak) yang diberikan oleh BAZNAS atau Menteri Agama sebagai otoritas yang berwenang.

Kata Kunci: *Akuntansi ZIS, Baitulmaal Muamalat, PSAK 109 Revisi 2021*

A. Pendahuluan

Zakat merupakan sumber dana titipan dari muzaki untuk disalurkan kembali kepada para mustahik (penerima zakat) dengan amanah dan tanggung jawab, maka dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan yang jelas akan menghasilkan pengelolaan zakat yang efektif. Hal tersebut dapat membantu membangun kepercayaan para muzaki serta memastikan dana tersebut dikelola dengan baik dan didistribusikan dengan tepat sasaran. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang memberikan dampak positif dalam proses pelaksanaan, pengelolaan, serta penyaluran zakat dapat dikatakan memiliki efisiensi yang baik (1).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengelola laporan keuangan yaitu dengan menerapkan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (2). Menurut Yusi dan Elvia (3) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman praktik akuntansi yang berlaku di Indonesia. Standar ini dirumuskan dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang harus diterapkan oleh lembaga amil zakat, yaitu PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. PSAK 109 memuat ketentuan mengenai akuntansi zakat dan akuntansi infak dan sedekah di antaranya meliputi pengakuan dan pengukuran awal, pengukuran selanjutnya, penjualan, penyaluran, serta penyajian dan pengungkapan dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

PSAK 109 telah mengalami beberapa perubahan, di antaranya pada tahun 2021. Draft Eksposur dari PSAK ini dikeluarkan pada 22 Desember 2021. Pada 31 Mei 2022 disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS IAI) (4). PSAK 109 (Revisi 2021) ini diharapkan dapat memudahkan amil dalam menyusun laporan keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Di Indonesia salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional yaitu Baitulmaal Muamalat yang didirikan pada tahun 2000 oleh Bank Muamalat dan diresmikan oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mengelola serta menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) kepada para mustahik (5). Pada Tahun 2019 Baitulmaal Muamalat tercatat telah menjadi pionir yang melakukan penerapan dini PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf dalam pelaporan keuangan wakafnya yang telah diaudit oleh Badan Wakaf Indonesia (6). Hal tersebut mencerminkan bahwa Baitulmaal Muamalat sebagai Nazhir Wakaf yang memiliki bentuk profesionalitas dan tingkat kepatuhan yang baik dalam menerapkan PSAK sesuai dengan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf.

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimana penerapan PSAK 109 (Revisi 2021) terhadap penyajian laporan keuangan lembaga zakat di Baitulmaal Muamalat” serta “Bagaimana implikasi hukum bagi lembaga amil zakat yang tidak melakukan pencatatan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah”. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan PSAK 109 (Revisi 2021) terhadap penyajian laporan keuangan lembaga zakat di Baitulmaal Muamalat.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum bagi lembaga amil zakat yang tidak melakukan pencatatan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Sumber data menggunakan data primer berupa hasil jawaban angket yang telah diajukan kepada informan dari pihak amil Baitulmaal Muamalat dan data sekunder berupa buku, jurnal, serta literatur lain yang relevan dengan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, angket, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tiga cara, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Penerapan PSAK 109 (Revisi 2021) Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Lembaga Zakat di Baitulmaal Muamalat

Tabel 1. Akuntansi Zakat

Aspek	PSAK 109 (Revisi 2021)	Baitulmaal Muamalat	Kesesuaian
Pengakuan dan pengukuran awal	Menurut PSAK ini “Pengakuan penerimaan zakat akan diakui oleh amil sebagai penghasilan dana zakat ketika amil menerima aset zakat. Diukur sebesar nilai nominal apabila dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar apabila dalam bentuk aset non kas.”	Baitulmaal Muamalat mengakui penerimaan zakat ketika kas atau aset lainnya diterima, diukur sebesar jumlah yang diterima apabila dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar apabila aset nonkas.	Sesuai
	“Nilai wajar aset nonkas ditentukan berdasarkan harga pasar yang wajar. Apabila tidak tersedia harga pasar yang wajar, penerimaan zakat dalam bentuk aset nonkas hanya dicatat dalam catatan atas laporan keuangan.”	Baitulmaal Muamalat menentukan nilai wajar untuk aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar.	Sesuai
Pengukuran selanjutnya	“Aset zakat dalam bentuk aset keuangan selain kas, seperti surat berharga syariah dan aset komoditas seperti logam mulia, dapat mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan. Aset ini tidak dapat disalurkan kepada mustahik dalam bentuk aslinya. Pengukuran aset ini berdasarkan nilai wajar dan perubahannya diakui dalam dana zakat.”	Baitulmaal Muamalat menerima aset zakat yang nilainya berfluktuasi dan aset tersebut akan diukur menggunakan harga pasar. Apabila tidak tersedia harga pasar yang wajar maka pengukurannya dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya.	Sesuai
	Menurut PSAK 109 (Revisi 2021) “Apabila aset zakat terjadi kehilangan atau kerusakan sehingga tidak dapat didistribusikan pada mustahik, maka kerugian atas aset tersebut diakui sebagai dana zakat, apabila kerugian bukan disebabkan oleh kelalaian amil dan diakui dana amil, apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian amil.”	Implementasi di Baitulmaal Muamalat apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan aset zakat yang bukan disebabkan oleh kelalaian amil, maka kerugian tersebut akan diakui sebagai pengurang dana zakat. Namun, apabila disebabkan oleh kelalaian amil maka akan diakui sebagai pengurang dana amil.	Sesuai
Penjualan	PSAK 109 (Revisi 2021) mengatur bahwa “Penjualan aset zakat dalam bentuk nonkas dapat ditunaikan dengan cara penjualan yang mungkin mengakibatkan terjadinya perbedaan antara jumlah kas neto yang diterima dengan jumlah	Baitulmaal muamalat belum pernah melakukan penjualan aset zakat berupa nonkas.	Belum menerapkan

	tercatat. Perbedaan tersebut diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dana zakat.” “Penyaluran zakat oleh entitas amil akan diakui sebagai beban dalam dana zakat ketika zakat diterima oleh mustahik, diukur sebesar jumlah tercatat kas atau aset nonkas.”	Baitulmaal Muamalat mengakui penyaluran zakat sebagai pengurang dana zakat ketika zakat tersebut telah diterima mustahik, diukur sebesar jumlah yang diserahkan, apabila dalam bentuk kas dan sebesar jumlah tercatat, apabila dalam bentuk aset nonkas.	Sesuai
	Menurut PSAK 109 (Revisi 2021) “Penyaluran zakat kepada mustahik non-amil dapat dilakukan secara langsung kepada mustahik non-amil, atau secara tidak langsung kepada mustahik non-amil melalui perantara entitas lain. Penyaluran tersebut diakui sebagai beban dalam dana zakat entitas amil pada saat zakat diterima oleh mustahik non-amil.”	Baitulmaal Muamalat melakukan penyaluran zakat secara langsung kepada para mustahik dalam bentuk kas dan nonkas. Baitulmaal Muamalat juga pernah melakukan penyaluran zakat kepada non-amil melalui perantara entitas lain. Zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran. Piutang akan berkurang ketika zakat telah disalurkan secara langsung kepada mustahik.	Belum sesuai
Penyaluran zakat	Menurut PSAK 109 (Revisi 2021) “Zakat dapat disalurkan dalam bentuk aset kelolaan, seperti rumah atau fasilitas umum lain yang dialokasikan untuk mustahik non-amil. Penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan diakui sebagai beban dalam dana zakat sebesar seluruhnya, apabila aset tersebut dikelola entitas lain yang tidak dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh amil dan sebesar umlah penyusutan atau amortisasi dari aset kelolaan selama masa manfaatnya apabila aset tersebut dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh amil.” “Penyaluran zakat kepada mustahik non-amil dengan syarat harus dikembalikan merupakan bentuk penyaluran zakat dengan cara pemberian <i>al-qardh al-hasan</i> yang akan diakui sebagai	Baitulmaal Muamalat belum pernah melakukan penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan. Baitulmaal Muamalat belum pernah menyalurkan zakat dengan cara <i>al-qardh al-hasan</i>.	Belum menerapkan Belum menerapkan

	beban dalam dana zakat ketika dilakukan hapus tagih.” Ketentuan dalam PSAK bahwa “Entitas amil menyajikan aset neto terkait pengelolaan zakat menjadi dana zakat dan dana amil. Serta menyajikan piutang penyaluran zakat, <i>al-qardh al-hasan</i>, dan aset kelolaan zakat disajikan dalam pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan.”	Implementasi di Baitulmaal Muamalat penyajian aset neto terkait pengelolaan zakat sudah sesuai dengan PSAK 109, yaitu disajikan menjadi dana zakat dan dana amil serta menyajikan piutang penyaluran zakat, serta aset kelolaan sebagai pos tersendiri.	Sesuai
Penyajian dan pengungkapan	Pengungkapan pengelolaan zakat meliputi hal berikut : -Umum, terkait penjelasan bagian amil atas penerimaan zakat, keberadaan aset yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan zakat (bunga bank), rincian aset zakat.	Baitulmaal Muamalat mengungkapkan penjelasan bagian amil atas penerimaan zakat, keberadaan aset yang tidak dapat diakui (bunga bank), dan juga rincian aset zakat.	Sesuai
	-Penerimaan zakat, meliputi rincian penerimaan zakat, penjelasan atas penerimaan aset non kas yang tidak diakui.	Baitulmaal Muamalat mengungkapkan rincian penerimaan zakat.	Sesuai
	-Penyaluran zakat, meliputi kebijakan penyaluran, rincian penyaluran zakat, serta penyaluran zakat kepada pihak berelasi.	Baitulmaal Muamalat mengungkapkan kebijakan dan rincian penyaluran zakat.	Sesuai
	-Aset kelolaan, meliputi penjelasan penyaluran, rincian, dan rekonsiliasi jumlah tercatat aset kelolaan.	Baitulmaal Muamalat belum pernah menyalurkan zakat dalam bentuk aset kelolaan, sehingga tidak diungkapkan.	Belum menerapkan
	-<i>Al-qardh al-hasan</i>, meliputi penjelasan penyalurannya dan rekonsiliasi jumlah tercatat .	Baitulmaal Muamalat belum pernah melakukan penyaluran dengan <i>al-qardh al-hasan</i> sehingga tidak diungkapkan.	Belum menerapkan
	-Investasi, meliputi penjelasan penggunaan zakat untuk investasi, rincian, dan rekonsiliasi jumlah tercatat.	Baitulmaal Muamalat belum pernah menggunakan dana zakat untuk investasi, sehingga tidak diungkapkan.	Belum menerapkan

Sumber: Data diolah Peneliti (2024)

Tabel 2. Akuntansi Infak dan Sedekah

Aspek	PSAK 109 (Revisi 2021)	Baitulmaal Muamalat	Kesesuaian
Pengakuan dan pengukuran awal	Menurut PSAK 109 (Revisi 2021) “Pengakuan penerimaan infak dan sedekah akan diakui oleh amil sebagai penghasilan dana infak dan sedekah ketika amil menerima aset infak dan sedekah. Diukur sebesar nilai nominal, apabila	Baitulmaal Muamalat mengakui penerimaan dana infak dan sedekah terikat atau tidak terikat berdasarkan tujuan dari pemberi infak dan sedekahnya. Penerimaan	Sesuai

	dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar apabila dalam bentuk aset non kas.” PSAK ini menetapkan bahwa “Nilai wajar aset nonkas ditentukan berdasarkan harga pasar yang wajar. Apabila tidak tersedia harga pasar yang wajar, penerimaan zakat dalam bentuk aset nonkas hanya dicatat dalam catatan atas laporan keuangan.” Menurut PSAK 109 (Revisi 2021) “Jika entitas amil menerima infak dan sedekah berupa aset tidak lancar yang diamanahkan oleh pemberinya untuk dikelola oleh amil, maka penerimaan aset tersebut diakui sebagai penghasilan dalam dana amil, apabila amil sebagai penerima manfaat dan sebagai dana infak dan sedekah, apabila pihak selain amil sebagai penerima manfaat.” “Aset infak dan sedekah dalam bentuk aset keuangan selain kas, seperti surat berharga syariah dan aset komoditas seperti logam mulia, dapat mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan. Aset ini tidak dapat disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk aslinya. Pengukuran aset ini berdasarkan nilai wajar dan perubahannya diakui dalam dana infak dan sedekah.” Menurut PSAK 109 (Revisi 2021) “Apabila aset infak dan sedekah terjadi kehilangan atau kerusakan sehingga tidak dapat didistribusikan pada penerima manfaat, maka kerugian atas aset tersebut diakui sebagai dana infak dan sedekah, apabila kerugian bukan disebabkan oleh kelalaian amil dan sebagai dana amil, apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian amil.” PSAK 109 (Revisi 2021) mengatur bahwa “Penjualan aset infak dan sedekah dalam bentuk nonkas dapat ditunaikan dengan cara	tersebut diukur sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. Baitulmaal Muamalat menentukan nilai wajar untuk aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Baitulmaal Muamalat menerima infak dan sedekah dalam bentuk aset tidak lancar, yaitu mobil jenazah yang diamanahkan oleh pemberinya untuk dikelola oleh amil, maka penerimaan aset tersebut diakui sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah karena mobil tersebut dimanfaatkan oleh pihak selain amil. Penerimaan aset infak dan sedekah yang nilainya berfluktuasi akan diukur menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar di Baitulmaal Muamalat diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah apabila terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil dan diakui sebagai pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Baitulmaal muamalat belum pernah melakukan penjualan aset infak dan sedekah berupa nonkas.	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Belum menerapkan
Pengukuran selanjutnya			
Penjualan			

	penjualan yang mungkin mengakibatkan terjadinya perbedaan antara jumlah kas neto yang diterima dengan jumlah tercatat. Perbedaan tersebut diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dana infak dan sedekah.”		
	Penyaluran zakat oleh entitas amil menurut PSAK 109 (Revisi 2021) akan diakui sebagai beban dalam dana infak dan sedekah ketika infak dan sedekah diterima oleh penerima manfaat, diukur sebesar jumlah tercatat kas atau aset nonkas.	Baitulmaal Muamalat mengakui penyaluran zakat sebagai pengurang dana infak dan sedekah ketika telah diterima penerima manfaat, diukur sebesar jumlah yang diserahkan, apabila berupa kas dan sebesar nilai tercatat aset, apabila berupa aset nonkas.	Sesuai
Penyaluran infak dan sedekah	“Penyaluran infak dan sedekah oleh amil dapat dilakukan dengan: - Secara langsung kepada penerima manfaat; atau - Secara tidak langsung kepada penerima manfaat melalui perantara entitas lain. Penyaluran ini akan diakui sebagai beban dalam dana infak dan sedekah entitas amil saat infak dan sedekah tersebut telah diterima oleh penerima manfaat.”	Baitulmaal Muamalat melakukan penyaluran infak dan sedekah secara langsung kepada para penerima manfaat dalam bentuk kas dan nonkas. Baitulmaal Muamalat juga pernah melakukan penyaluran infak dan sedekah secara tidak langsung kepada penerima manfaat melalui perantara entitas lain. Penyaluran infak dan sedekah tersebut akan diakui sebagai piutang penyaluran, piutang akan berkurang ketika infak dan sedekah telah disalurkan secara langsung kepada penerima manfaat.	Belum sesuai
	Menurut PSAK 109 (Revisi 2021) “Infak dan sedekah dapat disalurkan dalam bentuk aset kelolaan, seperti rumah atau fasilitas umum lain yang dialokasikan untuk penerima manfaat. Penyaluran infak dan sedekah dalam bentuk aset kelolaan diakui sebagai beban dalam dana infak dan sedekah sebesar seluruhnya, apabila aset dikelola entitas lain yang tidak dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh amil dan sebesar jumlah penyusutan atau amortisasi dari aset kelolaan selama masa manfaatnya. Apabila	Baitulmaal Muamalat belum pernah melakukan penyaluran infak dan sedekah dalam bentuk aset kelolaan. Apabila Baitulmaal Muamalat melakukan penyaluran infak dan sedekah berupa aset kelolaan, maka pengakuan penyalurannya akan diakui sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 109.	Sesuai

Sedekah jasa	aset tersebut dikendalikan langsung maupun tidak langsung oleh amil. Aset kelolaan diukur menggunakan metode biaya.” PSAK 109 (Revisi 2021) mengatur mengenai “Penerimaan sedekah jasa dalam laporan keuangan yang akan diakui jika nilai wajar jasa bisa diukur secara andal dengan bukti yang memadai seperti tagihan dari pemberi jasa.”	Baitulmaal Muamalat Belum pernah menerima menerapkan sedekah dalam bentuk jasa.
Penyajian dan pengungkapan	“Penerimaan dan penyaluran sedekah jasa diakui oleh entitas amil sebagai dana infak dan sedekah sebesar nilai wajar jasa yang diterima.” “Entitas amil menyajikan aset neto pengelolaan infak dan sedekah menjadi dana infak dan sedekah dan dana amil serta menyajikan piutang penyaluran infak dan sedekah, <i>al-qardh al-hasan</i>, dan aset kelolaan infak dan sedekah disajikan dalam pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan.” Pengungkapan pengelolaan infak dan sedekah mencakup hal berikut: - Umum, meliputi penjelasan bagian amil atas penerimaan infak dan sedekah, penjelasan infak dan sedekah terikat dan tidak terikat, rincian aset infak dan sedekah. - Penerimaan infak dan sedekah meliputi rincian penerimaan infak dan sedekah. - Penyaluran infak dan sedekah meliputi kebijakan, rincian, dan penyaluran infak sedekah pada pihak berelasi. - Aset kelolaan, meliputi penjelasan rincian serta rekonsiliasi jumlah tercatat terkait penyaluran infak dan sedekah dalam bentuk aset kelolaan. - <i>Al-qardh al-hasan</i>, meliputi penjelasan dan rekonsiliasi jumlah tercatat atas penyaluran infak dan sedekah dengan <i>al-qard al-hasan</i>.	Penyajian aset neto terkait pengelolaan infak dan sedekah di Baitulmaal muamalat sesuai dengan PSAK 109 dan menyajikan piutang penyaluran infak dan sedekah, serta aset kelolaan sebagai pos tersendiri. Baitulmaal Muamalat mengungkapkan penjelasan bagian amil atas infak dan sedekah, penjelasan infak sedekah terikat dan tidak terikat, serta rincian aset infak dan sedekah. Baitulmaal Muamalat mengungkapkan rincian penerimaan infak dan sedekah. Baitulmaal Muamalat mengungkapkan kebijakan, rincian dalam penyaluran infak dan sedekah. Baitulmaal Muamalat belum pernah menyalurkan infak dan sedekah dalam bentuk aset kelolaan, sehingga tidak diungkapkan. Baitulmaal Muamalat belum pernah melakukan penyaluran infak sedekah dengan <i>al-qardh al-hasan</i>

	sehingga	tidak	
	diungkapkan.		
- Investasi, meliputi penjelasan, rincian, dan rekonsiliasi jumlah tercatat atas penyaluran infak sedekah untuk investasi.	Baitulmaal	Muamalat	Belum menerapkan
	belum pernah menggunakan dana infak dan sedekah untuk investasi, sehingga tidak diungkapkan.		
- Sedekah jasa, meliputi penjelasan dan rinciannya.	Baitulmaal	Muamalat	Belum menerapkan
	belum pernah menerima infak dan sedekah dalam bentuk jasa, sehingga tidak diungkapkan.		

Sumber: Data diolah Peneliti (2024)

Implikasi Hukum bagi Lembaga Aml Zakat yang Tidak Melakukan Pencatatan Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 77c mengatur bahwasanya sanksi administratif akan diberikan kepada BAZNAS atau LAZ apabila tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan. Pada pasal 80 disebutkan bahwa sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, dan atau pencabutan atas izin operasionalnya (7).

Sanksi yang diberikan kepada lembaga amil zakat (LAZ) berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. Penerapan sanksi dalam regulasi termasuk kedalam asas legalitas. Asas legalitas merupakan suatu tuntutan hukum yang diberikan apabila terdapat pihak yang melanggar aturan atau bahkan meninggalkan perbuatan yang telah diatur. Apabila dalam pandangan fikih, penerapan sanksi atas perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan regulasi maka disebut dengan *ta'zir*.

Ta'zir yang diterapkan bagi lembaga amil zakat (LAZ) ini termasuk jenis *ta'zir al-khashshah* (sanksi pengurangan hak). Pihak lembaga amil zakat yang terindikasi melanggar aturan yang telah ditetapkan maka diberikan pengurangan hak berupa sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan operasional hingga pencabutan izin operasionalnya sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Konsep *ta'zir* memiliki tujuan utama yaitu untuk menghilangkan tindakan yang mengganggu ketertiban serta ketertiban umum sehingga dengan adanya *ta'zir* ini dapat menciptakan kemaslahatan. *Ta'zir* berada di bawah pihak otoritas ulil amri (penguasa/pemerintah) sebagai hakim yang berhak menjatuhkan hukuman tertentu atas pelanggaran tersebut (8).

Penerapan sanksi bagi lembaga amil zakat (LAZ) dalam hal ini BAZNAS memiliki wewenang untuk memberikan sanksi jika lembaga amil zakat tidak melakukan pencatatan yang memadai atas pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Selain itu, pihak yang berwenang memberikan sanksi berupa pencabutan izin operasional dari lembaga amil zakat adalah Menteri. BAZNAS adalah suatu lembaga pemerintah non-struktural yang memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (9). BAZNAS merupakan wujud dari pemerintah sebagai hakim yang memiliki kewenangan regulasi untuk memberikan sanksi berupa *ta'zir*. Sanksi yang diterapkan atas pelanggaran yang dilakukan bukan semata-mata hanya untuk peraturan saja. Namun, sanksi tersebut diberikan untuk kemaslahatan bagi pihak lembaga amil zakat. Sesuai dengan kaidah fikih berikut:

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Hukum *ta'zir* berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan"

Bentuk kemaslahatan dalam permasalahan ini berupa tertib administrasi, serta pencatatan, dan pelaporan yang transparan yang diterapkan oleh lembaga amil zakat. Apabila lembaga amil zakat patuh terhadap aturan dalam pencatatan dan pelaporan dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekahnya, maka dapat menghasilkan laporan yang terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga amil zakat juga akan mendapatkan kepercayaan dari para muzaki maupun para pihak yang berkepentingan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, kesimpulan dari hasil penelitian yaitu:

1. Lembaga zakat Baitulmaal Muamalat dalam melakukan penyusunan laporan keuangan dana zakat, infak, dan sedekahnya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 109 (Revisi 2021). Dalam aspek penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan melalui entitas lain, implementasi Baitulmaal Muamalat dalam pencatatannya masih harus menyesuaikan dengan ketentuan PSAK 109 (Revisi 2021). Baitulmaal Muamalat mengakui penyaluran zakat, infak, dan sedekah melalui entitas lain sebagai piutang penyaluran, sedangkan dalam ketentuan PSAK 109 (Revisi 2021) diakui sebagai beban dalam dana zakat atau dana infak dan sedekah.
2. Bagi lembaga zakat yang tidak melakukan pencatatan atas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekahnya akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan sementara, dan pencabutan izin operasional. Sanksi dalam ilmu fikih salah satu bentuknya adalah *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan hukuman yang diserahkan pada hakim atau otoritas yang berwenang. Dalam konteks lembaga amil zakat, sanksi yang diberikan termasuk ke dalam *ta'zir al-khashshah* (sanksi pengurangan hak). Otoritas yang berwenang untuk memberikan sanksi pada lembaga amil zakat yaitu BAZNAS dan Menteri Agama. *Ta'zir* yang diterapkan ini hanya berupa *ta'zir* administratif saja, bukan *ta'zir* yang sifatnya pidana.

Acknowledge

Terima kasih kepada dosen pembimbing dan pihak Baitulmaal Muamalat yang sudah mendukung kelancaran penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Wijayanti IM, Ibrahim MA, Fauziah E, Gustriana D, Az-Zahra N. Performance Efficiency Of Zakat Management Organization (OPZ) In Indonesia. LAA MAISYIR J Ekon Islam [Internet]. 2021;8(2):90–105. Tersedia pada: <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/24318>
- [2] Sholeh H. Analisis Laporan Keuangan dan Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah PSAK 101 dan PSAK 109 (Studi Kasus LAZ Sidogiri). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; 2023.
- [3] Maesaroh Y, Dewi EP. Analisis Akuntansi Persediaan Barang Dagang Berdasarkan PSAK 14 (Studi Kasus Pada PT XYZ-CTP 1). J Buana Akunt [Internet]. 2020;5(1):1–14. Tersedia pada: <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/1016>
- [4] Ikatan Akuntansi Indonesia. Pengesahan Revisi PSAK 109 dan PSAK 101 [Internet]. 2022 [dikutip 19 Februari 2024]. Tersedia pada: https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/pengesahan_revisi_psak_109_dan_psak_101#gsc.tab=0
- [5] Baitulmaal Muamalat. Company Profile Baitulmaal Muamalat 2024. 2024.
- [6] Rahayu EM. Baitulmaal Muamalat Pelopori Laporan Keuangan PSAK 112 untuk Badan Wakaf [Internet]. swa.co.id. 2019 [dikutip 29 Januari 2023]. Tersedia pada: <https://swa.co.id/swa/csr-corner/baitulmaal-muamalat-pelopori-laporan-keuangan-psak-112-untuk-badan-wakaf>
- [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 2014.

- [8] Adam P. Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir. *Tahkim J Perad dan Huk Islam* [Internet]. 2019;2(2):39–66. Tersedia pada: <https://scholar.archive.org/work/zt74o644zvg23mzamvyqg2fftm/access/wayback/https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/download/5114/pdf>
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.